

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan oleh penelitian kali ini tidak mengabaikan pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah ringkasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yang serupa, persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Peneliti yang melakukan penelitian dengan topik serupa adalah :

1. Anggita Pitasari (2014)
2. Isna Yulianti dan Agung Nur Probohudono (2013)
3. Wardani Prawinandi, dkk. (2012)
4. Wulan Dwi Utami, dkk. (2012)
5. Mike Ettredge, et.al (2010)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Uji	Hasil / Simpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggita Pitasari (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan IFRS - Independen : jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit - Kontrol : Profitabilitas, <i>leverage</i>, likuiditas 	Statistik deskriptif dan analisis regresi berganda	<p>Variabel yang terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS adalah jumlah anggota komite audit dan rapat komite audit sebagai variabel independen. Sedangkan variabel lainnya tidak mempengaruhi adanya kepatuhan pengungkapan IFRS perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. b. Variabel independen yang digunakan adalah proporsi komisaris independen. c. Variabel kontrol yang digunakan adalah <i>leverage</i> dan likuiditas. d. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian ini, variabel independen yang juga digunakan adalah proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, jumlah anggota dewan direksi dan kepemilikan institusional, sedangkan pada penelitian Pitasari, variabel independen lainnya yang digunakan adalah jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota

						<p>komite audit, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit.</p> <p>b. Pada penelitian Pitasari, sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa. Sedangkan pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.</p> <p>c. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2010-2013. Sedangkan pada penelitian Pitasari, periode yang digunakan adalah 2010-2012.</p>
2.	Isna Yulianti dan Agung Nur Probohudono (2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan IFRS - Independen : <i>corporate</i> 	Statistik deskriptif dan analisis regresi berganda	Variabel yang terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS	e. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan pengungkapan	a. Sampel yang digunakan dalam penelitian Isna dkk. adalah perusahaan property dan real

		<p><i>governance, country, size, Board Independen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrol : Profitabilitas, <i>leverage</i>, auditor 		<p>adalah <i>corporate governance, country, size</i>, dan <i>board independent</i> sebagai variabel independen dan <i>leverage</i> sebagai variabel kontrol. Sedangkan variabel lainnya yaitu profitabilitas dan tipe auditor tidak mempengaruhi adanya kepatuhan pengungkapan IFRS perusahaan.</p>	<p>wajib IFRS.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit dan dewan direksi. g. Variabel kontrol yang digunakan adalah <i>leverage</i>. h. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 	<p>estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Periode yang digunakan dalam penelitian Isna adalah 2009 – 2011 sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2010-2013.
3.	Wardani Prawinandi et. al. (2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen : Tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS - Independen : jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris 	<p>Statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda</p>	<p>Struktur <i>corporate governance</i> mempengaruhi tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. b. Variabel independen yang digunakan adalah 	<ul style="list-style-type: none"> d. Pada penelitian ini, variabel independen yang juga digunakan adalah proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial dan

		<p>independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, proporsi anggota komite audit independen</p> <p>- Kontrol : jumlah anggota dewan direksi, profitabilitas, <i>leverage</i></p>		<p><i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Variabel independen dan variabel kontrol lainnya tidak berpengaruh.</p>	<p>jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen.</p> <p>c. Variabel kontrol yang digunakan adalah <i>leverage</i>.</p> <p>d. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda.</p>	<p>kepemilikan institusional, sedangkan pada penelitian Prawinandi et al, variabel independen lainnya yang digunakan adalah latar belakang pendidikan komisaris utama dan proporsi komisaris wanita.</p> <p>e. Pada penelitian Prawinandi et al, sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa. Sedangkan pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.</p> <p>f. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2010-2013. Sedangkan pada</p>
--	--	--	--	---	---	--

						penelitian Prawinandi et al, periode yang digunakan adalah 2009-2010.
4.	Wulan Dwi Utami, dkk. (2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen : tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS - Independen : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen. - Kontrol : <i>leverage</i>, profitabilitas, tipe auditor 	Statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda	Mekanisme <i>corporate governance</i> mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, <i>leverage</i> , profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel independen yang digunakan adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. b. Variabel kontrol yang digunakan adalah <i>leverage</i>. c. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. i. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. d. Sampel penelitian yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian yang dilakukan Utami, variabel independen lainnya yang digunakan adalah jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit, sedangkan pada penelitian ini, variabel independen yang juga digunakan adalah jumlah anggota dewan komisaris dan proporsi anggota komite audit independen. b. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah periode 2010-2013. Sedangkan Utami

				tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.	adalah perusahaan manufaktur.	menggunakan periode penelitian 2009-2010.
5.	Mike Ettredge, dkk (2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen : kepatuhan pengungkapan - Independen : ukuran perusahaan, kualitas <i>corporate governance</i>, jumlah auditor eksternal, kabar buruk dalam 8-K Item 4 	Statistik deskriptif, uji regresi berganda	Variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan IFRS adalah <i>corporate governance</i> dan jumlah auditor eksternal. Variabel lainnya yaitu ukuran perusahaan dan kabar buruk dalam 8-K Item 4 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. b. Variabel independen yang digunakan <i>corporate governance</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang dilakukan Ettredge menggunakan ukuran perusahaan, dan kabar buruk sebagai variabel independen sedangkan penelitian tidak menggunakan variabel tersebut. b. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2010-2013 sedangkan periode yang digunakan Ettredge adalah 2005-2007

Sumber : Diolah

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan bermacam-macam konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan yang biasanya dialami oleh manajer dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, kreditur dan manajer karena adanya hubungan keagenan (*agency relationship*) (Septiani, 2005). Hubungan keagenan dapat terjadi ketika satu atau lebih individu yang bertindak sebagai *principal* menggunakan jasa seorang individu yang bertindak sebagai agen untuk mengelola dan mengambil keputusan dalam operasional perusahaan.

Konsep *corporate governance* yang merupakan konsep pengembangan dari teori keagenan yang diyakini dapat memiliki fungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan (Herawaty, 2008). Agar investor lebih yakin bahwa dana yang mereka investasikan tidak disalahgunakan oleh pihak manajemen, langkah yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah dengan mengungkapkan informasi kinerja manajemen dalam laporan keuangan. Laporan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban manajemen atas dana yang telah diinvestasikan oleh investor.

Guna memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam pengelolaan dana milik pemegang saham dan meyakinkan pemegang saham bahwa

manajemen tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan pemegang saham maka konsep *corporate governance* diterapkan agar dapat memenuhi harapan tersebut sehingga konflik kepentingan dan biaya keagenan dapat diminimalisasi (Ratnasari, 2011). Teori agensi memiliki asumsi bahwa perilaku manusia dapat memberikan prediksi atau gambaran mengenai konsekuensi logis secara tepat dan menganggap bahwa individu memiliki banyak peran dalam organisasi sehingga penggunaan teori agensi pada penelitian ini dianggap relevan (Pitasari & Septiani, 2014).

2.2.2 Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Terdapat 2 sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan Miranti, 2009). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang

diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan (Adina & Ion, 2008). *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008).

Pengungkapan menurut Suwardjono (2005:578) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Peraturan tentang pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) telah diungkapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/Bl/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik serta Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No: Kep-346/Bl/2011, tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PSAK 10

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 mengatur tentang perubahan kurs valuta asing. Tujuan dari pernyataan ini untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi ke dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah kurs

mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs ke dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diterapkan pada :

- Akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran;
- Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang masuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi, konsolidasi proporsional, atau metode ekuitas; dan
- Menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian.

Pernyataan ini diterapkan pada penyajian laporan keuangan entitas dalam valuta asing dan mengatur persyaratan untuk menghasilkan laporan keuangan yang patuh pada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk penjabaran informasi keuangan ke dalam valuta asing yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Pernyataan ini menentukan informasi apa saja yang diungkapkan. Pernyataan ini tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi dalam valuta asing, atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

2. PSAK 13

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 13 mengatur tentang properti investasi. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan ini juga diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan *lessee* dan untuk pengukuran properti investasi yang diserahkan *lessee* yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan *lessor*. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

3. PSAK 14

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 mengatur tentang persediaan. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan, kecuali :

- Pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung;
- Instrumen keuangan

Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

4. PSAK 16

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 mengatur tentang aset tetap. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk :

- Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- Pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi;
- Hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui.

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan mengembangkan atau memelihara aset yang dijelaskan dalam huruf (b)-(c).

Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi menggunakan model biaya dalam Pernyataan ini. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

5. PSAK 23

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 mengatur tentang pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Tujuan Pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini : penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

6. PSAK 26

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 26 mengatur tentang biaya pinjaman. Prinsip dasar yang digunakan adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut dan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk

akuntansi biaya pinjaman. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan Pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar atau persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

7. PSAK 30

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 mengatur tentang sewa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi *lessee* maupun *lessor* dalam hubungannya dengan sewa. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua jenis sewa selain :

- Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan
- Perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta.

Pernyataan ini berlaku untuk perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset meskipun penyediaan jasa oleh *lessor* tetap dalam mengoperasikan atau memelihara aset tersebut. Pernyataan ini tidak berlaku untuk

perjanjian penyediaan jasa yang tidak mengalihkan hak untuk menggunakan aset dari satu pihak . Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

8. PSAK 56

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 56 mengatur tentang laba per saham. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama, dan antar periode pelaporan. Pernyataan ini diterapkan laporan keuangan individual entitas yang diperdagangkan fokus pernyataan ini pada penyebut yang digunakan dalam prenghitungan laba per saham.pernyataan ini diterapkan pada :

- Laporan keuangan individual entitas yang memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa, atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran; dan
- Laporan keuangan konsolidasi suatu kelompok usaha dengan entitas induk yang memiliki saham basa atau instrumen saham biasa , atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran.

Entitas yang mengungkapkan laba per saham menghitung dan mengungkapkan laba per saham sesuai dengan Pernyataan ini. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

2.2.3 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Bank World mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekuler sekitar secara keseluruhan. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Effendi (2008: 2) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP).

2.2.4 Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), asas – asas dalam GCG antara lain :

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.5 Struktur Corporate Governance

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *two – tiers system*, artinya perusahaan mempunyai dua badan yang terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001). Lebih lanjut, menjelaskan bahwa struktur *corporate governance* di Indonesia terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prawinandi, Suhardjanto dan Triatmoko (2012) menyimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan proporsi anggota komite audit independen.

a. Jumlah Anggota Dewan Direksi

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006) menjelaskan bahwa direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Undang-undang Nomor 40 Pasal 92 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa jumlah minimal anggota direksi adalah dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan direksi dilakukan melalui rapat umum pemegang saham.

b. Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang disebut sebagai komisaris independen. FCGI (2001) menjelaskan bahwa kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside director*, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris.

Butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang Bersifat Ekuitas di Bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

c. Proporsi anggota komite audit independen

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut.

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.

Perihal keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, di mana setidaknya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dengan outsider melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

e. Kepemilikan Institusional

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung

atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Adanya investor institusional dapat mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan untuk menyelaraskan hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer tersebut.

2.2.6 Variabel Kontrol

a. Likuiditas

Arti likuiditas menurut Harahap (2013: 301) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang

lancar. Beberapa rasio likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas atas aktiva lancar, rasio kas atas utang lancar, rasio aktiva lancar dan total aktiva serta rasio aktiva lancar dan total utang.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Rasio cepat menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid menutupi utang lancar. Rasio kas atas aktiva lancar menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Rasio kas atas utang lancar menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. Rasio aktiva lancar dan total aktiva menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva. Rasio aktiva lancar dan total utang menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahaan. Rumus rasio lancar adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \dots \dots \dots (1)$$

b. Leverage

Arti rasio *leverage* menurut Harahap (2013: 307) menggambarkan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari rasio Solvabilitas. Rumus dari *leverage* adalah

$$DER = \frac{\text{utang}}{\text{modal}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

2.2.7 Hubungan Jumlah Anggota Dewan Direksi dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Dewan direksi memiliki tugas untuk mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena direksi yang profesional akan memiliki integritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan untuk melakukan tugasnya. Selain itu direksi harus mempertanggungjawabkan keengurusannya dalam RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan publik di Indonesia hanya sekedar berusaha mematuhi ketentuan dalam peraturan jumlah minimal anggota dewan direksi sehingga berapapun jumlahnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.2.8 Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan

berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dapat berjalan efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) didapatkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

2.2.9 Hubungan Proporsi Anggota Komite Audit Independen dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keefektifan peran komite audit ini didukung oleh keberadaan komite audit independen (Nafisah, 2011). Semakin banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan Cety (2010) menunjukkan bahwa anggota komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap *environmental performance*, termasuk dalam pengungkapan informasi.

2.2.10 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Kepatuhan

Pengungkapan Wajib IFRS

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen dapat menjadi lebih giat karena termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012).

2.2.11 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Tingkat

Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal tersebut

karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar.

2.2.12 Hubungan Likuiditas dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Semakin rendah kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para *stakeholder* dimana perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder* dan sebagian perusahaan yang lain berusaha untuk mengurangi pengungkapan informasi untuk menghindari kecurigaan para pemilik saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pitasari (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

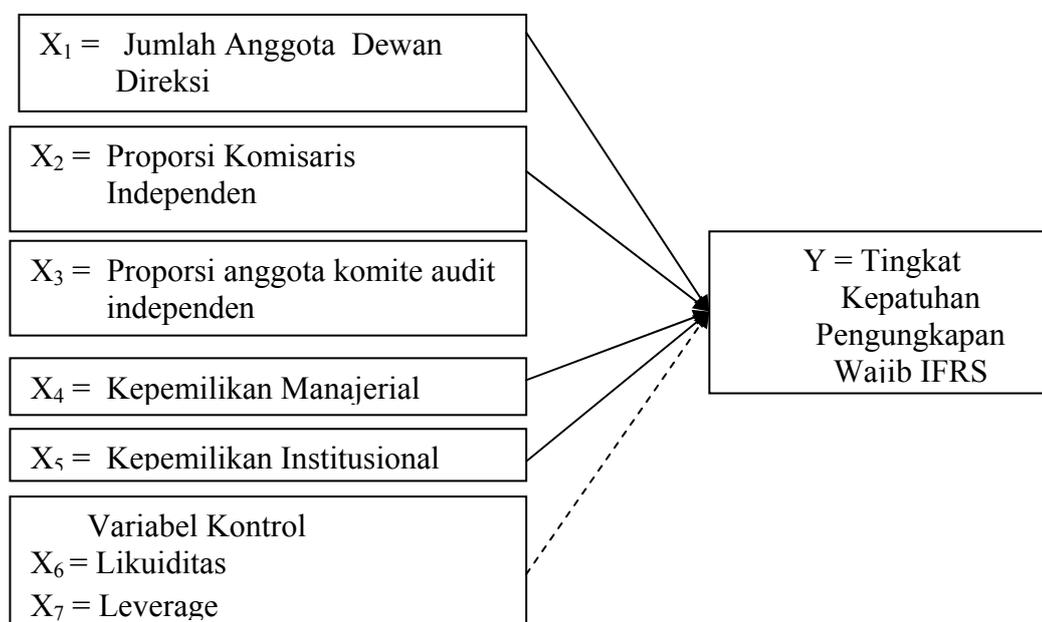
2.2.13 Hubungan *Leverage* dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para *stakeholder* karena manajemen memiliki kesempatan untuk tidak mengungkapkan informasi yang akan menjadi sorotan *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) dan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun suatu model alur kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : Diolah

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi anggota komite audit independen sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage* sebagai variabel

kontrol yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS sebagai variabel dependen.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H2 : Proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H3 : Proporsi anggota komite audit independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H4 : Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H5 : Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H6 : Likuiditas sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.
- H7 : *Leverage* sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.